

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR**PENGUKURAN KINERJA BELANJA DALAM LAPORAN REALISASI
ANGGARAN (LRA) PADA DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**

*Disusun Dan Dianjurkan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli
Madya (A.Md) Pada Jurusan Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

**OLEH :****DIVA NADAA HAFIZA****NIM. 02270425063****PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI****FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****TAHUN 2025**



LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama

: Diva Nadaa Hafiza

NIM

: 02270425063

Program Studi

: Diploma III Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Ilmu Sosial


Judul

: Pengukuran Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran
(LRA) Pada Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru

Pekanbaru,

Disetujui

Pembimbing


Nelsi Arisandy, SE, M.Ak, Ak, CA
NIP. 19791010 200710 2 011

Mengetahui

Dekan

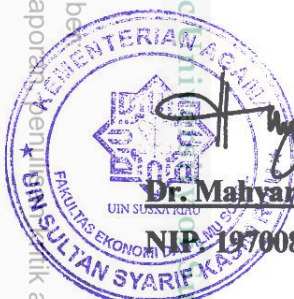
Ketua Prodi


Dr. Mahyarni, S.E., M.M

NIP. 19700826 199903 2 001


Dr. Hj. Hariza Hasyim, SE, M.Si

NIP. 19760910 200901 2 003



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nama : Diva Nadaa Hafiza

NIM : 02270425063

Jurusan : D-III Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Judul Tugas Akhir : “Pengukuran Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru”

Tanggal Ujian : 27 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua Penguji

Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos, M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

Sekretaris

Hijratul Aswad, SE, M.Ak
NIP. 19860912 202012 1 006

Penguji I

Dr. Andi Irfan, SE, M.Sc, Ak, CA, CSRS
NIP. 19830418 200604 1 001

Penguji II

Hidayati Nasrah, SE, M.ACC. AK
NIK. 19841229 201101 2 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
UIN Suska Riau
The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Diva Nadia Hafiza

NIM : 02270425063

Tempat/Tgl. Lahir: Pekanbaru, 19 maret 2004

Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu sosial

Prodi : D3 Akuntansi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PENGUKURAN KINERJA BELANJA DALAM LAPORAN REALISASI

ANGGARAN (LRA) PADA DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,

Saya membuat pernyataan



Hafiza

NIM : 02270425063

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip, memperbanyak atau menjual karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak atau menjual karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak atau menjual karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak atau menjual karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak atau menjual karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak atau menjual karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak atau menjual karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak atau menjual karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak atau menjual karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak atau menjual karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak atau menjual karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak atau menjual karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak atau menjual karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak atau menjual karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak atau menjual karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak atau menjual karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak atau menjual karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak atau menjual karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak atau menjual karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak atau menjual karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak atau menjual karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak atau menjual karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak atau menjual karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak atau menjual karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak atau menjual karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak atau menjual karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak atau menjual karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak atau menjual karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak atau menjual karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak atau menjual karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak atau menjual karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak atau menjual karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak atau menjual karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, memperbanyak atau menjual karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PENGUKURAN KINERJA BELANJA DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PADA DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU

OLEH:

DIVA NADAA HAFIZA

02270425063

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja anggaran pada Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru tahun 2023 dan 2024 dengan fokus pada efisiensi, efektivitas, varians belanja, pertumbuhan belanja, dan keserasian belanja. Hasil menunjukkan efisiensi berada pada kategori cukup efisien sebesar 87,09% di tahun 2023 dan 89,09% di tahun 2024, sedangkan efektivitas tergolong kurang efektif dengan nilai 71,86% dan 74,44%. Analisis varians menunjukkan adanya (under-spending) akibat tunda bayar dan keterlambatan pelaksanaan. Pertumbuhan belanja mengalami penurunan sebesar -14,13%, yang berdampak pada kapasitas pelayanan publik. Belanja operasi mendominasi lebih dari 87%, sementara belanja modal justru menurun, menandakan ketidakseimbangan struktur belanja. Temuan ini menunjukkan pentingnya evaluasi perencanaan anggaran, penyesuaian dengan output, dan penyeimbangan belanja untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Pengukuran kinerja, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Efektivitas belanja, Efisiensi belanja, Analisis Belanja Daerah*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah membimbing kita agar selalu berada di jalan-Nya. Berkat Rahmat-Nya penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik yang berjudul **"Pengukuran Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru"**.

Shalawat dan Salam kepada junjungan kita sekaligus suri tauladan Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya yang kita harapkan di akhirat kelak, Amiin Ya Rabbal Alamin. Penyusunan Tugas Akhir merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Ahli Madya Pada Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Suksesnya Penyusunan Tugas Akhir ini, penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang memberikan bimbingan, arahan, dukungan serta bantuan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
3. Ibu Dr. Hariza Hasyim, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan D-III Akuntansi yang telah memberikan motivasi kepada mahasiswa D-III Akuntansi.
4. Ibu Febri Rahmi, SE, M.Sc, Ak, CA selaku Sekretaris Jurusan D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ibu Nelsi Arisandy, S.E.,M.Ak.Ak.CA Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa sehingga penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dan Lancar.

6. Ibu Identiti, S.E.,M.Ak.Ak.CA Selaku Penasehat Akademik, terimakasih atas waktu, nasehat, masukan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan ini.

7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan yang sangat berharga. Semoga ilmu tersebut dapat digunakan dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara Indonesia.

8. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Surya Mahdi (Ayah) dan Dian Anggraini (Bunda), atas segala doa, dukungan, dan pengorbanan yang tak ternilai. Terima kasih atas semangat dan keyakinan yang selalu diberikan. Bahkan di saat penulis meragukan diri sendiri, Ayah dan Bunda selalu menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah, dan tanpa kasih sayang serta dukungan kalian, penulis tidak akan mampu sampai pada tahap ini. Segala pencapaian ini adalah buah dari doa dan usaha kalian yang tak pernah henti, yang selalu menyertai penulis dalam proses meraih cita-cita.

9. Keluarga Besar Penulis, Opa, Alm. Oma, Tante Windy, Om Rian, Mami Ovit, Om Indra yang Selalu Senantiasa Mencurahkan Doa, Nasihat, Motivasi, Kasih Sayang dan Harapan serta Dukungan dan Materil kepada Penulis, Tidak Lupa Pula Kepada Kakak dan Adik-Adik Penulis, Uni Nadin, Wildan, Abi, Ayra, Raisha dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qinara yang selalu menghibur serta menyemangati penulis selama penyelesaian Tugas Akhir ini.

10. Untuk Sahabat Penulis Naura Fatina, Terimakasih selalu menjadi Support System dan Penyemangat penulis serta menjadi tempat keluh kesah penulis selama menyelesaikan Tugas Akhir ini.

11. Terimakasih untuk Para Sahabat seperjuangan Penulis, Aulia Alvineisya, Mirna Afriani dan Haryati Dewinta yang selalu ada disamping penulis baik di saat susah maupun senang. Terimakasih atas segala dukungan dan pengalaman yang kalian bagikan untuk penulis selama masa perkuliahan.

12. Untuk Ibu Endang Yuliana selaku staf Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru, Terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis baik dalam pengumpulan data serta membantu penulis untuk segala keperluan yang ada di instansi tersebut.

12. Terimakasih untuk seluruh staff Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru yang telah membantu dan memberikan waktu kepada penulis dalam memperoleh data dan informasi.

11. Kepada diri sendiri, Diva Nadaa Hafiza. Terimakasih sudah bertahan dan berjuang sampai saat ini. Semoga kesuksesan menghampirimu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat berbagai kekurangan. Meskipun telah diupayakan secara maksimal dengan landasan data serta referensi yang relevan, penulis tetap membuka diri terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan di masa mendatang. Besar harapan penulis, Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat sebagai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

referensi tambahan bagi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta dapat menjadi kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang yang dikaji.

Pekanbaru, 13 Mei 2025

Penulis,

Diva Nadaa Hafiza

NIM. 02270425063

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
4.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian.....	17
1.4 Metode Penelitian.....	19
1.5 Sistematika Penulisan.....	20
BAB II GAMBAR UMUM INSTANSI	22
2.1 Sejarah Singkat Instansi	22
2.2 Visi dan Misi Instansi.....	23
2.3 Struktur Organisasi.....	24
2.4 Tugas dan Wewenang.....	24
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....	34
3.1 Tinjauan Teori	34
3.1.1 Pengukuran	34
3.1.2 Kinerja	35
3.1.3 Pengukuran Kinerja	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	3.1.4 Kinerja Belanja	42
	3.1.5 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	43
	3.1.6 Belanja Daerah.....	46
	3.1.7 Pengukuran Kinerja Sektor Publik	50
	3.1.8 Efisiensi	52
	3.1.9 Efektivitas	54
	3.1.10 Analisis Belanja Daerah.....	56
	3.1.11 Outcome.....	61
	3.1.12 Kinerja Dalam Perspektif Islam.....	62
	3.2 Tinjauan Praktek.....	63
	3.2.1 Pengukuran Efisiensi	63
	3.2.2 Perbandingan Pengukuran Efisiensi	64
	3.2.3 Pengukuran Efektivitas	66
	3.2.4 Perbandingan Pengukuran Efektivitas	67
	3.2.5 Pengukuran Kinerja Belanja Menggunakan Alat Analisis Kinerja Belanja Daerah.....	69
	3.2.6 Perbandingan Pengukuran Kinerja Belanja Menggunakan Alat Analisis Kinerja Belanja Daerah.....	73
	BAB IV PENUTUP	76
	4.1 Kesimpulan.....	76
	4.2 Saran.....	78
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru	24
--	----





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel III. 1 Perbandingan Pengukuran Efisiensi Tahun 2023 dan 2024.....	64
Tabel III. 2 Perbandingan Pengukuran Efisiensi Tahun 2023 dan 2024.....	68
Tabel III. 3 Perbandingan Pengukuran Varians Belanja Tahun 2023 dan 2024..	69
Tabel III. 4 Perbandingan Analisis Pertumbuhan Belanja Tahun 2023 dan 2024	70
Tabel III. 5 Perbandingan Analisis Pertumbuhan Belanja Tahun 2023 dan 2024	71
Tabel III. 6 Perbandingan Analisis Pertumbuhan Belanja Tahun 2023 dan 2024	72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi telah membawa perubahan signifikan terhadap cara pemerintah mengelola anggarannya. Ketika tekanan untuk menjadi lebih efisien dan efektif meningkat, pemerintah harus beradaptasi terhadap perubahan-perubahan ini agar tetap efisien dan efektif. Salah satu dampak utama globalisasi terhadap anggaran pemerintah adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus mampu mengelola anggarannya dengan lebih baik, meminimalisir penggunaan dana yang tidak tepat sasaran dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun globalisasi juga membawa tantangan baru terhadap anggaran pemerintah. Meningkatnya kompleksitas permasalahan global mengharuskan pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. (Suaedi, 2019)

Akuntansi Pemerintahan adalah kegiatan yang memberikan layanan untuk menyajikan informasi keuangan suatu pemerintahan. Ini didasarkan pada proses mencatat, merangkum, mengelompokkan transaksi keuangan yang terjadi dalam pemerintah, dan mengartikan informasi keuangan tersebut. Dalam pengelolaan keuangan pemerintah, informasi akuntansi memiliki peran penting untuk menggambarkan transaksi ekonomi dan keuangan yang terkait dengan lembaga pemerintah serta organisasi non-profit lainnya. Tugas utama akuntansi pemerintahan biasanya terfokus pada pencatatan pelaksanaan anggaran negara dan penyusunan laporan hasilnya. (Kewas et al., 2024)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut (Apriyanti et al., 2019), Peranan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik memegang posisi yang sangat strategis dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi di wilayah administratifnya. Keberhasilan pembangunan daerah pada umumnya sangat bergantung pada sejauh mana pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks otonomi daerah, pengelolaan keuangan tidak hanya mencerminkan kapasitas fiskal suatu daerah, tetapi juga menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, serta mempertanggungjawabkan kebijakan fiskal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengukuran kinerja keuangan menjadi aspek yang sangat krusial karena dapat memberikan gambaran objektif mengenai tingkat akuntabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan. Evaluasi atas kinerja keuangan ini juga diperlukan sebagai dasar dalam menyusun strategi pembangunan yang berkelanjutan, serta menjadi indikator penting dalam menilai komitmen pemerintah daerah terhadap tata kelola yang baik (good governance). Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah yang optimal akan menjadi pondasi utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

Menurut (Sholikhah & Priyono, 2022), Pemerintah daerah beroperasi sebagai entitas otonom yang tentunya memiliki aturan sendiri dalam pengelolaan keuangan di wilayahnya. Namun, aturan itu harus tetap berdasarkan pada undang-undang dan peraturan yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Dalam pengelolaan keuangannya, pemerintah daerah bertanggung jawab kepada pihak yang berwenang serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam masalah keuangan daerah, dengan tujuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menjalankan pemeriksaan internal dan pemeriksaan eksternal terkait pelaksanaan keuangan di daerah tersebut. Pemeriksaan internal pada pengelolaan keuangan tidak hanya mengawasi urusan uang, tetapi juga mengawasi penerapan rencana, kegiatan, dan pengelolaan yang dibuat oleh pemerintah daerah, melalui efektivitas yang dapat berdampak pada kesehatan dan performa keuangan daerah. Ini terlihat pada perhitungan Laporan Pencapaian Keuangan yang digunakan untuk menilai tingkat dan efektivitas daerah dalam mencapai program-programnya. Pemantauan ini dapat dilakukan oleh otoritas di bidangnya untuk memastikan laporan pelaksanaan anggaran yang jelas dan tepat. Tinjauan ini bertujuan untuk memahami pentingnya penerapan akuntansi sektor publik di lembaga pemerintah.

Akuntansi sektor publik dalam perkembangannya, dijelaskan sebagai akuntansi yang berkaitan dengan dana publik, yang merupakan metode akuntansi dan cara untuk menilai pengelolaan dana publik. Dana publik dipahami sebagai uang yang dimiliki oleh masyarakat keseluruhan, bukan oleh individu. Uang ini biasanya dikelola oleh sebuah organisasi dari sektor publik atau melalui kerjasama antara sektor publik dan swasta. Di Indonesia, akuntansi sektor publik dapat dipahami sebagai suatu metode akuntansi dan cara analisis untuk mengelola dana publik di lembaga pemerintah pusat, di institusi tinggi negara dan departemen, di institusi pelayanan publik, di organisasi pemerintah daerah, di badan pelayanan publik yang terdapat di daerah, serta kepada masyarakat, organisasi sosial, dan lembaga sosial lainnya. (Nevi Costari & Putri Ariella Belinda, 2021)

Pengukuran kinerja adalah cara teratur untuk melihat apakah program atau aktivitas yang sudah dirancang sesuai dengan rencana yang ada dan lebih penting



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lagi, apakah telah mencapai hasil yang diharapkan saat perencanaan. Proses ini dimulai dengan menentukan indikator kinerja yang memberikan informasi sehingga unit kerja di sektor publik dapat memantau kinerjanya dalam menghasilkan hasil dan dampak untuk masyarakat. Pengukuran kinerja sangat membantu pengambil keputusan untuk memantau dan meningkatkan kinerja serta memperhatikan tujuan organisasi agar dapat memenuhi tuntutan akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai tanggung jawab organisasi dan pemimpin dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Tanggung jawab bukan hanya tentang menunjukkan bagaimana uang publik digunakan, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menunjukkan bahwa uang tersebut telah digunakan dengan cara yang efektif, efisien, dan hemat. Pengukuran kinerja dipakai sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja, untuk menilai apakah suatu organisasi, program, atau aktivitas berhasil atau tidak. Perbedaan antara hasil yang benar-benar dicapai dan anggaran yang sudah ditetapkan menjadi fokus utama. Angka-angka ini secara tidak langsung menunjukkan kemampuan pegawai dalam menyusun anggaran. (Palimbongan, 2019)

Pengukuran kinerja anggaran yang berkaitan dengan beban APBN merupakan elemen integral dari pengelolaan keuangan publik yang bertujuan untuk menjamin bahwa alokasi anggaran dipergunakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan sasaran strategis pemerintah. Berbagai pendekatan seperti anggaran berbasis kinerja, Balanced Scorecard, serta penerapan KPI, ditambah dengan alat seperti SIMAK-NG, Monev, audit kinerja, dan survei kepuasan publik berperan signifikan. Meski demikian, ada tantangan yang harus dihadapi, seperti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterbatasan data, kerumitan program, dan kapasitas SDM, agar pengukuran kinerja anggaran dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. (Supriyanto, 2024)

Pengukuran kinerja keuangan daerah dapat dilaksanakan dengan menggunakan alat analisis rasio keuangan untuk daerah, termasuk juga pada aspek belanja daerah. Evaluasi terhadap belanja daerah sangat penting untuk menilai apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD dengan cara yang ekonomis, efisien, dan efektif. Dari Laporan Realisasi Anggaran, analisis belanja daerah dapat dilakukan dengan cara mengaplikasikan analisis rasio varians belanja, analisis rasio keserasian belanja, dan analisis rasio efisiensi belanja. Berdasarkan hasil analisis terhadap belanja daerah, analisis rasio varians belanja menunjukkan bahwa kinerja belanja pemerintah daerah dianggap baik jika realisasi belanja tetap dalam batas anggaran yang ditentukan. Analisis rasio keserasian belanja mengharuskan pemerintah daerah untuk menciptakan keseimbangan dalam belanja, sedangkan dalam analisis rasio efisiensi belanja, pemerintah daerah dianggap efisien jika rasio efisiensinya berada di bawah 100%, dan sebaliknya, jika melampaui angka tersebut, maka dianggap terjadi pemborosan dalam anggaran. (Sholikhah & Priyono, 2022)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan dan Reformasi Aparatur Negara birokrasi, Dinas Pertanahan kota Pekanbaru wajib merumuskan Laporan kinerja tahunan. Pembuatan laporan Kinerja ini sebagai bentuk akuntabilitas untuk Mengukur keberhasilan implementasi tindakan Berperilaku sesuai dengan indikator dan tujuan yang telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan Pemerintah dan peraturan di Dinas Pertanahan. Pelaporan kinerja sebagai alat pengukuran kinerja dan evaluasi internal secara berurutan serta Performa yang lebih optimal dan sumber daya terbatas Sepenuhnya mendukung penyampaian kinerja. Pengelolaan pendapatan dan pengeluaran diatur oleh anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Kinerja et al., 2023)

Penilaian terhadap kinerja merupakan langkah penting yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan atau deviasi selama proses pelaksanaan, apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang telah dirancang, serta apakah hasil akhir yang dicapai telah sesuai dengan target yang diharapkan. Dalam konteks sistem pengendalian manajemen, penilaian kinerja berperan sebagai mekanisme evaluatif yang membandingkan antara rencana awal dan pencapaian aktual, menganalisis berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi, serta memberikan dasar bagi tindakan korektif guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional organisasi. (Syafri, 2019)

Proses penganggaran merupakan salah satu elemen penting untuk mendukung kegiatan operasional sebuah pemerintahan. Oleh karena itu, saat menyusunnya, harus dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, sambil mempertimbangkan ketentuan serta jenis biaya yang akan ditanggung oleh pemerintahan. Rencana anggaran belanja perlu saling terkait untuk mendukung proses usaha dalam mendapatkan pendapatan. (Hehanussa, 2024)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tingginya fokus terhadap penghematan anggaran saat ini terkait dengan permasalahan pemutusan kontrak kerja bagi pegawai honorer atau tenaga harian lepas. Namun, Pemerintah Kota Pekanbaru masih mempertahankan anggaran untuk pegawai honorer atau Tenaga harian lepas pada tahun 2025. Dengan demikian, anggaran untuk pegawai honorer tidak mengalami pengurangan sebagai bentuk efisiensi, karena proses transisi status ke Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) masih berlangsung dan belum seluruhnya terselesaikan. Oleh karena pegawai honorer tersebut masih aktif menjalankan tugasnya, alokasi anggaran tetap dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 guna menjamin kelangsungan operasional pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru tidak terdampak oleh kebijakan pemutusan kontrak pegawai honorer. Dinas tersebut tetap mengalokasikan anggaran secara normal, sehingga seluruh aktivitas dapat berjalan sebagaimana mestinya hingga proses pengangkatan P3K selesai dilakukan. Meskipun demikian, penerapan kebijakan penghematan anggaran belanja tetap dilanjutkan. Berdasarkan data tahun 2024, terjadi pengurangan anggaran pada alokasi dana perjalanan dinas dan belanja rutin, dengan pemotongan terbesar terjadi pada belanja jasa. Hal ini disebabkan karena pembayaran gaji pegawai masih menjadi prioritas utama dalam struktur anggaran.

Implementasi kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 memiliki dampak signifikan terhadap pengelolaan anggaran pemerintah. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 dengan menargetkan penghematan sebesar Rp306,69 triliun. Namun, kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan dampak negatif pada sektor-sektor tertentu, seperti perhotelan dan transportasi, akibat pengurangan biaya perjalanan dinas dan meeting. Dalam menindaklanjuti kebijakan ini, Pemerintah Kota Pekanbaru, di bawah kepemimpinan Pj Walikota Roni Rakhmat, berencana melakukan penghematan anggaran pada tahun 2025 dengan penghapusan dan pengurangan beberapa aktivitas serta pemangkasan anggaran untuk perjalanan dinas. Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai salah satu instansi di bawah Pemkot Pekanbaru akan menerapkan strategi efisiensi anggaran, termasuk pembatasan pengeluaran untuk kegiatan non-esensial, pengurangan anggaran perjalanan dinas hingga 50%, pembatasan pengeluaran honorarium, dan penetapan prioritas anggaran untuk mencapai target kinerja dalam pelayanan publik. Dengan demikian, evaluasi yang cermat terhadap dampak kebijakan efisiensi anggaran sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan peningkatan efektivitas anggaran dapat tercapai tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan stabilitas ekonomi. (Tempo.co, 2025)

Pemerintahan harus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran dalam era globalisasi. Salah satu contohnya adalah pengembangan sistem anggaran yang lebih transparan dan akuntabel, serta peningkatan alokasi anggaran untuk program-program yang lebih strategis. Selain itu, pemerintahan juga harus melakukan reformasi birokrasi untuk mengurangi birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan publik. Upaya-upaya ini dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran pemerintahan, serta meningkatkan kepuasan masyarakat. (Zamzami, 2025)

Menurut (Karinda et al., 2018), Dalam pelaporan keuangan sektor publik, belanja yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjadi salah satu komponen utama yang memiliki tingkat signifikansi tinggi serta menarik perhatian publik secara luas. Hal ini dikarenakan masyarakat, sebagai kontributor utama dana publik melalui pembayaran pajak daerah, memiliki kepentingan langsung terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran tersebut. Mereka berhak mengetahui sejauh mana dana yang telah dikumpulkan dari masyarakat digunakan secara tepat sasaran, efisien, dan efektif untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan publik. Dengan demikian, belanja daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyalurkan sumber daya fiskal, melainkan juga menjadi cerminan dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Di sisi lain, merancang kebijakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sering kali menjadi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan aktivitas membelanjakan dana yang telah tersedia. Oleh karena itu, pemanfaatan belanja daerah harus diarahkan secara bijak agar mampu menghasilkan nilai tambah yang sebanding dengan beban fiskal yang ditanggung oleh masyarakat, serta menjadi tolok ukur efektivitas kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Laporan Realisasi Anggaran yang dirilis oleh pemerintah daerah memberikan insight yang sangat berguna untuk mengevaluasi performa keuangan wilayah. Ketika dibandingkan dengan neraca, LRA memiliki tingkat kepentingan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lebih tinggi. Laporan ini adalah laporan keuangan daerah pertama yang disiapkan sebelum menyusun laporan neraca, laporan operasional, dan laporan arus kas. Anggaran dalam konteks pemerintahan berfungsi sebagai pondasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Anggaran memainkan peran penting dalam membantu pengelolaan keuangan negara, pengembangan infrastruktur serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, LRA diakui sebagai laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang paling utama. Dari LRA ini, pembaca dapat melakukan analisis kinerja keuangan termasuk analisis pendapatan, analisis belanja, serta analisis pembiayaan. (Ratnasari, 2019)

Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru merupakan aspek yang sangat penting untuk menggambarkan kinerja keuangan yang telah dilaksanakan. Belanja tersebut mencerminkan kebijakan yang diambil dalam usaha menghasilkan pendapatan, yang tentu saja lebih menantang dibandingkan dengan pengeluarannya. Mengingat sifat belanja yang relatif mudah dan rentan terhadap inefisiensi serta kebocoran, sangatlah penting untuk melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan yang ketat terhadap belanja daerah. Setelah proses belanja dilakukan dan dilaporkan dalam LRA, analisis terhadap pengeluaran tersebut menjadi suatu keharusan. Hal ini bertujuan untuk menjadi dasar evaluasi, koreksi, dan perbaikan di masa mendatang. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian guna menganalisis kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru. (Kewas et al., 2024)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan terkait pengelolaan keuangan daerah dan belanja daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dan Belanja Daerah menetapkan bahwa pengelolaan ini memberi lebih banyak kekuasaan kepada pemerintah daerah. Kekuasaan ini termasuk kebebasan untuk menggunakan sumber dana dan memilih arah, tujuan, dan sasaran untuk penggunaan anggaran.(Asoka, 2019)

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi anggaran dengan anggaran yang sudah ditetapkan, serta untuk menilai keadaan keuangan dan mengevaluasi kinerja suatu entitas pelaporan. Untuk alasan ini, laporan keuangan sangat penting dalam membantu entitas pelaporan mematuhi peraturan yang berlaku.(Lembaran, 2023)

Penyajian laporan keuangan adalah salah satu hal penting untuk memenuhi tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan bersama sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah, harus ada bagian-bagian tertentu. Salah satu bagian yang penting adalah laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran harus disusun oleh entitas menurut aturan yang telah ditetapkan dalam hukum. Aturan tersebut memuat standar yang mengatur cara penyampaian laporan realisasi anggaran yang benar. Tujuan dari penetapan standar tersebut adalah untuk memberikan dasar penyusunan laporan realisasi anggaran bagi pemerintah sebagai wujud dari akuntabilitas publik. Dengan menyusun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laporan realisasi anggaran, informasi tentang realisasi anggaran dari entitas yang melakukan pelaporan dapat diperoleh. (Muzaedah et al., 2019)

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan Pemerintahan Daerah mengikuti prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara. Perlu adanya peningkatan dalam pengelolaan Pemerintah Daerah serta hubungan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. Hal ini dibahas dalam Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2017 di mana Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi hak daerah otonom, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bagian dari penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dalam menjalankan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD diberikan wewenang untuk membuat, mendiskusikan, dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam konteks kewenangan daerah otonom. (Paat et al., 2019)

Rasio efektivitas dan efisiensi belanja adalah perbandingan antara pengeluaran yang sebenarnya dengan anggaran yang ditetapkan. Ukuran rasio belanja ini dimanfaatkan untuk menilai seberapa besar penghematan anggaran yang diraih oleh Pemerintah. Angka efisiensi ini bersifat relatif, bukan absolut. Ini berarti tidak ada patokan yang universal untuk mengklasifikasikan rasio ini sebagai baik atau buruk. Kita hanya bisa menyatakan bahwa pengeluaran Pemerintah daerah lebih efisien dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah daerah dianggap telah melaksanakan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya berada di bawah seratus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persen (100%), sedangkan jika melebihi angka seratus persen (100%), maka itu menunjukkan adanya pemborosan anggaran. (Apriyanti et al., 2019)

Efisiensi dan efektivitas sangat penting untuk melaksanakan anggaran sebuah dinas. Jika efisiensi dan efektivitas berada pada tingkat yang baik, itu menunjukkan bahwa program-program pemerintah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan. Isu efisiensi dan efektivitas sering dihadapi oleh lembaga pemerintah. Banyak lembaga pemerintah berusaha untuk memenuhi standar efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran. Namun, mencapai standar ini bukanlah hal yang mudah. Lembaga pemerintah perlu mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Jika anggaran tidak digunakan dengan baik, maka standar efektif dan efisien tidak akan tercapai. Tentunya, pemerintah daerah tidak beroperasi tanpa bantuan, mereka didukung oleh organisasi perangkat daerah atau Dinas. Sebagai contoh, Dinas Pertanahan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan atau menerapkan rencana kegiatan pemerintah selama tahun anggaran atau periode tertentu. Untuk menilai apakah pelaksanaan anggaran di Dinas tersebut efektif atau tidak, penting untuk membandingkan dokumen pelaksana anggaran dengan laporan realisasi anggaran dari Dinas yang bersangkutan. (W. H. Prasetyo & Nugraheni, 2020)

Menilai laporan keuangan dari pemerintah daerah mengenai pengelolaan uang dapat dilakukan dengan cara melihat laporan realisasi anggaran yang sudah dilaporkan. Laporan Realisasi Anggaran harus menyampaikan informasi yang berguna bagi para pengguna laporan dengan cara yang efektif, efisien, dan hemat sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belanja yang ada di Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru, kita akan dapat mengetahui apakah anggaran yang telah dibuat dapat berfungsi sebagai pengendali dalam pelaksanaan kegiatan. Pengukuran kinerja belanja dapat dinilai dengan menggunakan metode analisis belanja, efektivitas rasio, dan efisiensi rasio belanja. Analisis ini dilaksanakan untuk memahami keseimbangan di antara pengeluaran yang mencerminkan bagaimana Pemerintah Daerah menempatkan prioritasnya pada pengeluaran secara maksimal dan berperan untuk menampilkan produktivitas serta efektivitas pengeluaran daerah yang dipakai oleh lembaga. (Silitonga, 2022)

Menurut (Niansyah & Biswan, 2018), Istilah varians memiliki definisi yang tidak sama dengan pengertian varians dalam ilmu statistika. Jika dalam statistika varians dipahami sebagai ukuran tingkat penyebaran suatu data terhadap nilai rata-ratanya, maka dalam akuntansi, varians merujuk pada selisih antara nilai yang direncanakan dengan hasil aktual yang diperoleh. Perbedaan pemaknaan ini penting untuk dipahami karena dalam konteks manajerial, analisis varians tidak hanya digunakan untuk menggambarkan perbedaan, tetapi juga berperan sebagai instrumen penting dalam mendukung proses perencanaan dan pengendalian organisasi. Keberadaan varians menjadi penanda awal adanya ketidaksesuaian antara target yang telah ditetapkan dan pelaksanaan di lapangan, sehingga diperlukan proses identifikasi dan analisis yang mendalam guna menemukan penyebabnya serta merumuskan langkah korektif yang tepat. Oleh karena itu, penerapan analisis varians menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem evaluasi kinerja, karena dapat membantu pihak manajemen dalam mengevaluasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

efektivitas pelaksanaan program serta menyusun strategi peningkatan efisiensi operasional secara berkelanjutan.

Penerapan akuntansi yang baik di instansi pemerintah, ditunjang dengan pengawasan efektif terhadap kualitas laporan keuangan, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi tersebut. Dengan upaya ini, pelaksanaan urusan pemerintahan dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, peningkatan kualitas akuntabilitas diharapkan juga mampu mengurangi praktik korupsi, sehingga menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance) di seluruh lapisan, baik di tingkat pusat maupun daerah di Indonesia. (Rahmawati & Heliana, 2022)

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 mengenai Sistem Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja (LKjIP) merupakan kewajiban bagi sebuah Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian atau ketidakberhasilan dalam pelaksanaan Tujuan dan Sasaran yang telah ditentukan untuk mencapai Visi dan Misi Organisasi. Selanjutnya, LKjIP juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja pejabat dalam menjalankan tugas. Sebagai instansi pemerintah, Dinas Pertanahan memiliki tanggung jawab untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang berisi pertanggungjawaban atas keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan dalam melaksanakan misi Dinas Pertanahan untuk meraih tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. (Pokhrel, 2024)

Berdasarkan latar belakang tersebut, jelas bahwa pengukuran kinerja memiliki peranan yang krusial bagi instansi publik yang ingin meningkatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitas layanan kepada masyarakat serta menjadi landasan strategis bagi instansi publik untuk memberikan layanan yang lebih optimal, responsif, dan sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh Karena itu, Penulis akan Menggunakan judul

”PENGUKURAN KINERJA BELANJA DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PADA DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU”





1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana gambaran yang telah di paparkan di latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Apakah Kinerja belanja pada Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru tahun anggaran 2023 dan 2024 ditinjau dari rasio efisiensi belanja sudah dapat dikatakan efisien?
2. Apakah kinerja belanja pada Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru tahun anggaran 2023 dan 2024 ditinjau dari rasio efektivitas belanja sudah dapat dikatakan efektif?
3. Apakah terdapat varians atau selisih antara anggaran yang direncanakan dan direalisasikan, serta apa faktor penyebabnya?
4. Bagaimana tren pertumbuhan belanja daerah selama dua tahun terakhir, dan apa dampaknya terhadap kapasitas pelayanan publik?
5. Sejauh mana keserasian alokasi antara belanja operasi dan belanja modal mencerminkan prioritas pembangunan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui ingkat efektivitas kinerja belanja pada Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023 dan 2024 ditinjau dari rasio efektivitas belanja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi kinerja belanja pada Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023 dan 2024 ditinjau dari rasio efisiensi belanja.
3. Untuk menganalisis varians belanja dan mengidentifikasi penyebab utama selisih antara anggaran dan realisasi.
4. Untuk menilai pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun serta dampaknya terhadap kemampuan belanja daerah.
5. Untuk menilai pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun serta dampaknya terhadap kemampuan belanja daerah.

b) Manfaat Penelitian

1. Bagi Praktisi

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan bahan pengembangan penelitian selanjutnya mengenai Pengukuran Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Diploma di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial jurusan D-III Akuntansi.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan tambahan ilmu tentang Pengukuran Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru.



1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada hari Kamis, 21 Februari 2025 di Kantor Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru.

2. Data dan Sumber

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kinerja anggaran belanja di Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan pegawai yang terlibat dalam pengelolaan anggaran, guna menggali informasi mengenai pelaksanaan, hambatan, serta upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran. Sementara itu, data sekunder digunakan untuk mengukur kinerja keuangan melalui rasio efisiensi, rasio efektivitas, dan alat analisis kinerja belanja daerah. Data sekunder ini bersumber dari dokumen resmi, situs web, jurnal ilmiah, buku, serta referensi tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan suatu keadaan secara objektif melalui proses pengumpulan, penafsiran, dan penyajian data berupa angka. Data diperoleh melalui studi dokumen yang meliputi pengumpulan arsip dan dokumen terkait objek penelitian, seperti sejarah instansi, susunan organisasi, serta informasi pendukung lainnya yang relevan. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dan observasi langsung di lapangan dengan tujuan memperoleh informasi yang lebih mendalam, komprehensif, dan relevan



mengenai kinerja anggaran belanja pada instansi tersebut, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang akurat dan menyeluruh.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam Membahas Permasalahan yang berkaitan dengan judul yang sudah dipaparkan, maka penulis membagi menjadi empat bab. Sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisi Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab ini Meliputi gambaran Instansi, Sejarah Singkat Instansi, Struktur Organisasi, Visi dan Misi serta Tugas dan Wewenang Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini meliputi pembahasan teori-teori yang mendukung landasan teori dan praktek diantaranya Pengertian Pengukuran, Kinerja, Pengukuran Kinerja, Kinerja Belanja, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Belanja Daerah, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Efisiensi, Efektivitas, Analisis Belanja, Outcome dan Kinerja dalam Perspektif Islam. Selanjutnya tinjauan praktek bagaimana mengukur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

:

kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru.

PENUTUP

Dalam bab ini, berisi penyampaian kesimpulan atas hasil penelitian, saran dan masukan untuk Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBAR UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Singkat Instansi

Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pertanahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Berdasarkan regulasi tersebut serta Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2016, Dinas Pertanahan diberikan mandat untuk merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan, dan memberikan pelayanan umum yang berkaitan dengan bidang pertanahan. Fungsi strategis dari dinas ini antara lain mencakup pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data pertanahan, inventarisasi tanah, pengurusan sertifikasi atas tanah yang merupakan aset milik pemerintah daerah, serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memastikan sinergi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan pertanahan. Selain itu, Dinas Pertanahan juga bertanggung jawab dalam penyelesaian berbagai bentuk sengketa pertanahan yang terjadi di wilayah administrasi Kota Pekanbaru. Peran ini menjadi semakin signifikan karena sektor pertanahan memiliki keterkaitan langsung dengan pembangunan, stabilitas hukum atas tanah, serta pengelolaan aset daerah. Dalam konteks pengukuran kinerja, pelaksanaan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di lingkungan Dinas Pertanahan mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi dari kebijakan yang diimplementasikan, serta menjadi indikator penting dalam menilai seberapa besar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontribusi dinas ini terhadap tata kelola aset dan pelayanan publik yang berbasis outcome. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis kinerja belanja yang direpresentasikan dalam LRA guna menilai akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan perwujudan tujuan strategis organisasi secara menyeluruh.

Salah satu tujuan Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru adalah pelaksanaan pengumpulan data di bidang pertanahan dan inventarisasi tanah aset pemerintah kota pekanbaru. Informasi ini tentu sangat diperlukan untuk menunjang pembangunan Kota Pekanbaru mencapai visinya. Kualitas suatu perencanaan pembangunan yang baik sangat membutuhkan ketersediaan dan aksesibilitas informasi yang cepat dan akurat mengenai data aset tanah Pemerintah Kota Pekanbaru beserta informasi letak dan posisi geografis tanah tersebut berada kebutuhan data spasial sangat penting dalam suatu perencanaan pembangunan daerah. Pada umumnya setiap jenis satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di setiap wilayah pada dasarnya memiliki karakteristik kebutuhan serta jenis data inventarisasi yang berbeda-beda. Namun demikian, di sisi lain, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam suatu wilayah administrasi yang sama tetap membutuhkan pertukaran dan integrasi data antar instansi sebagai dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan wilayah yang terarah dan terpadu.

2.2 Visi dan Misi Instansi

Visi

Terwujudnya Pelayanan Pertanahan yang berkualitas serta mewujudkan tanah sebagai sarana pembangunan untuk kesejahteraan Masyarakat.

Misi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

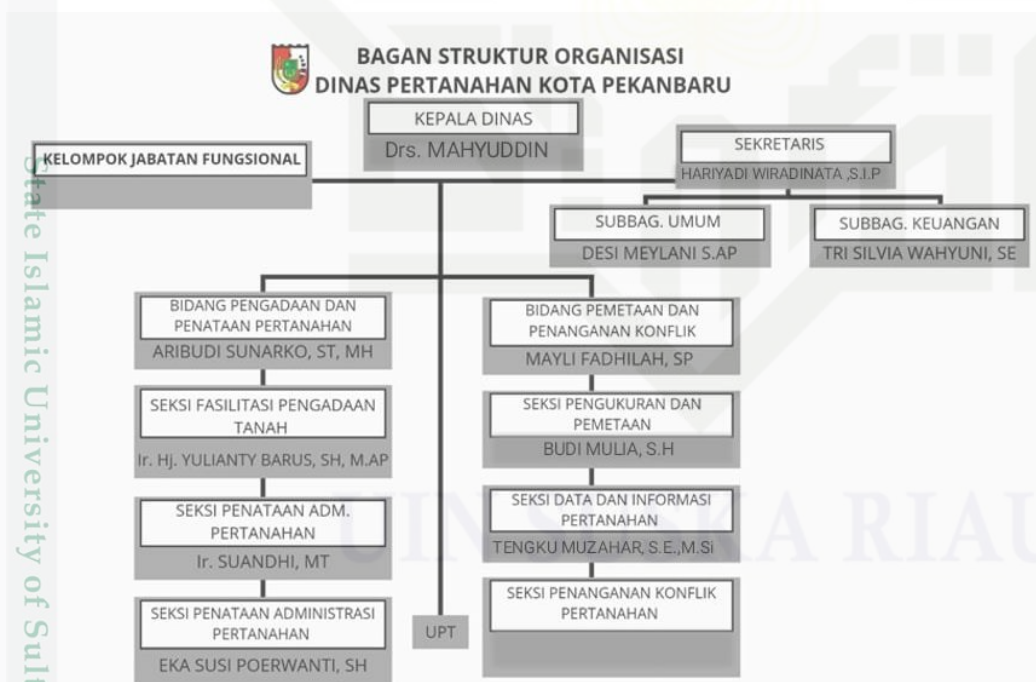
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meningkatkan Pelayanan publik di bidang pertanahan yang berkualitas
2. Mewujudkan tanah sebagai fungsi ekonomi dan fungsi sosial dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Peningkatan Pengelolaan dan Pengamanan Tanah Aset Pemerintah Daerah yang akuntabel.
4. Mewujudkan tertib administrasi kepemilikan dan penguasaan tanah yang adil guna kesejahteraan masyarakat.

2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi berperan penting dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui mekanisme kerja yang tertata dan akuntabel.

Gambar II. 1 Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru



Sumber: Dinas Pertanahan kota pekanbaru, 2025.

2.4 Tugas dan Wewenang



Adapun Tugas dan Wewenang pada Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. **Kepala Dinas**

Kepala Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru memiliki tanggung jawab untuk mendukung Walikota Pekanbaru dalam menjalankan aspek pemerintahan yang berkaitan dengan Pertanahan,

Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru fungsi sebagai berikut :

- a) Menyusun kebijakan teknis bidang Pertanahan berdasarkan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
- b) Merumuskan serta menetapkan kebijakan rencana strategis dan rencana kerja dibidang pertanahan.
- c) Menetapkan kebijakan pemberian izin lokasi dalam suatu daerah.
- d) Menetapkan kebijakan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah.
- e) Merumuskan dan menetapkan kebijakan subjek dan objek redistribusi tanah, Serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah.
- f) Menetapkan kebijakan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah.
- g) Menetapkan kebijakan penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah.
- h) Mengelola perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah.
- i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan tugas dan fungsinya.



2. *Sekretaris*

Sekretaris bertanggung jawab untuk merancang, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan agenda kerja administrasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi :

- a) Menyusun bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Sekretariat Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru berdasarkan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.
- b) Menyusun bahan koordinasi perencanaan, perumusan dan pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- c) Menyusun bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelola keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- d) Menyusun bahan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- e) Menyusun bahan koordinasi pembinaan dan perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
- f) Penyusunan bahan koordinasi pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- g) Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas pertanahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- h) Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Pertanahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- i) Pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan sekretariat dinas pertanahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan dengan tugasnya.

Sekretariat terdiri dari:

a. *Sub Bagian Umum*

Sub Bagian Umum bertanggung jawab untuk merencanakan, menyusun, merumuskan, dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan berjalan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi.

Sub Bagian Umum melaksanakan tugas dan fungsi :

- a) Perencanaan program kerja dan kegiatan Subbagian Umum meliputi urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga serta kearsipan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- b) Pelaksanaan fasilitas kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub bagian Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Pelaksanaan fasilitas urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
- d) Pelaksanaan fasilitas kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas.
- e) Pelaksanaan fasilitas pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
- f) Pelaksanaan fasilitasi urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah (BMD).
- g) Pelaksanaan fasilitasi kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta mengamankan di lingkungan dinas.
- h) Pelaksanaan fasilitas perumusan dan pelaksanaan pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta mengarsipkan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas.
- i) Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Subbagian Umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat efektif dan efisien.
- j) Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Subbagian Umum dengan cara membandingkan antara rencana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

- k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan memiliki tanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengelola keuangan organisasi dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas dan fungsi :

- a) Perencanaan kegiatan program kerja dan kegiatan Subbagian Keuangan meliputi pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pelaksanaan fasilitasi rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja.
- c) Pelaksanaan fasilitasi pengendalian dan pelaporan.
- d) Pelaksanaan fasilitasi penyusunan program.
- e) Pelaksanaan fasilitasi dan Penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan verifikasi serta penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- g) Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM).
- h) Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan
- i) Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- j) Pelaksanaan fasilitasi penyiapan dan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dinas.
- k) Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan penatausahaan aset yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- l) Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- m) Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.
- n) Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- o) Pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dengan tugas-tugas yang telah di laksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
- p) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Bidang Pengadaan dan Penataan Pertanahan

Bidang Pengadaan dan Penataan Pertanahan bertanggung jawab untuk mendukung beberapa tugas Kepala Dinas dalam menjalankan bagian anggaran, serta melaksanakan pengadaan dan penataan pertanahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.

Bidang Pengadaan dan Penataan Pertanahan melaksanakan tugas dan fungsi :

- a) Menyusun rencana operasional program kerja Bidang Pengadaan dan Penataan Pertanahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Menyusun bahan koordinasi rencana bidang Pengadaan dan Penataan Pertanahan sesuai dengan rencana kerja dinas.
- c) Penyusunan bahan koordinasi pemberian izin lokasi.
- d) Penyusunan bahan koordinasi Pengadaan tanah untuk kepentingan Umum.
- e) Penyusunan bahan koordinasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
- f) Penyusunan bahan koordinasi pelatihan dan bimbingan teknis pengadaan tanah bagi instansi/ Organisasi Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah.
- g) Penyusunan bahan koordinasi fasilitasi sertifikat milik daerah.
- h) Penyusunan bahan Konsolidasi Tanah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

4. *Bidang Pemetaan dan Penanganan Konflik*

Bidang Pemetaan dan Penanganan Konflik bertugas mendukung beberapa tanggung jawab kepala dinas dalam hal Pemetaan dan Penanganan Konflik terkait tanah.

Bidang Pemetaan dan Penanganan Konflik melaksanakan tugas dan fungsi :

- a) Menyusun rencana operasional program kerja Bidang Pemetaan dan Penanganan Konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Menyusun bahan koordinasi rencana Bidang Pemetaan dan Penanganan Konflik sesuai dengan rencana kerja dinas.
- c) Penyusunan bahan koordinasi Penetapan tanah ulayat.
- d) Penyusunan bahan koordinasi penyelesaian masalah tanah kosong serta inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong.
- e) Penyusunan bahan koordinasi inventarisasi dan penataan tanah bermasalah.
- f) Penyusunan bahan koordinasi identifikasi Penguasaan Penggunaan Pemanfaatan Pemilikan Tanah (IP4T)
- g) Penyusunan bahan koordinasi inventarisasi tanah milik pemerintah.
- h) Penyusunan bahan Koordinasi pengukuran dan pemetaan bidang per Kelurahan dan kecamatan.
- i) Penyusunan bahan koordinasi Sistem Informasi Pertanahan (SIP).
- j) Penyusunan bahan koordinasi Sistem Informasi Geografis (SIG).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k) Penyusunan bahan koordinasi basis data pertanahan per Kelurahan dan per kecamatan.
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan dengan tugasnya.

5. ***Kelompok Jabatan Fungsional***

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tenaga fungsional terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan dipimpin oleh seorang sub koordinator yang berada dibawah kepala bidang masing-masing.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja belanja pada Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru dari tahun 2023 sampai 2024 dapat dievaluasi melalui rasio efisiensi, efektivitas, dan analisis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hasil pengukuran kinerja ini dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru dalam mengelola anggaran dan mencapai tujuannya sebagai berikut:

1. Efisiensi anggaran belanja mencapai 87,09% di tahun 2023 dan meningkat menjadi 89,09% di tahun 2024. Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996, rasio 80–90% tergolong "cukup efisien". Namun, untuk mencapai kinerja optimal, sebaiknya efisiensi perlu ditingkatkan tanpa mengorbankan kualitas belanja.
2. Sebaliknya, efektivitas anggaran masih tergolong rendah, yakni 71,86% di tahun 2023 dan 74,44% di tahun 2024, yang berarti "kurang efektif". Penyebab utama adalah belanja yang tidak terealisasi, termasuk tunda bayar dan kegiatan yang tidak terlaksana. Ini mencerminkan perlunya perbaikan dalam perencanaan program dan penganggaran berbasis kinerja.
3. Pengukuran varian belanja, Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru menunjukkan kemampuan yang baik dalam memanfaatkan anggaran belanja pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, terdapat efisiensi anggaran belanja sebesar Rp2.727.403.399 atau 71,86%, sedangkan pada tahun 2024 sebesar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rp2.053.792.306. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi belanja yang dilakukan lebih kecil dari anggaran yang direncanakan, yang mengindikasikan bahwa Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru dapat memanfaatkan APBD dengan baik dan melakukan penghematan anggaran yang signifikan. Dengan demikian, analisis varian belanja menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran belanja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru cukup efektif dan efisien.

4. Pertumbuhan belanja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru mengalami penurunan signifikan pada periode tertentu. Belanja Modal Tanah menjadi komponen yang paling terdampak, dengan penurunan sebesar 27,63% atau Rp248.254.845. Secara keseluruhan, total belanja dinas tersebut turun sebesar 14,13% atau Rp984.160.563. Penurunan ini mengindikasikan adanya perubahan strategi dalam alokasi anggaran dan penggunaan sumber daya di Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan prioritas, efisiensi anggaran, atau penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah.

5. Hasil analisis keserasian belanja menunjukkan bahwa Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru lebih memprioritaskan belanja operasi dibandingkan belanja modal. Hal ini disebabkan karena fokus Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru tersebut saat ini hanya pada belanja modal tanah. Berdasarkan hasil penelitian, kinerja belanja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa belanja operasi mendominasi anggaran, sementara belanja modal memiliki porsi yang lebih kecil. Dominasi belanja operasi ini menunjukkan bahwa Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru tersebut lebih berfokus



kepada kegiatan operasional sehari-hari daripada investasi jangka panjang melalui belanja modal.

4.2 Saran

Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru perlu meningkatkan akurasi dan kedisiplinan dalam perencanaan anggaran, terutama dengan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang diusulkan dapat direalisasikan secara teknis dan administratif dalam tahun anggaran berjalan. Hal ini penting untuk mengurangi terjadinya tunda bayar dan sisa anggaran yang besar (*under-spending*). Optimalisasi belanja modal perlu menjadi prioritas, mengingat belanja ini mendukung investasi jangka panjang seperti pengadaan tanah dan pengembangan infrastruktur pertanahan. Dinas juga perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kegiatan dengan tingkat serapan rendah, khususnya pada belanja barang dan jasa yang realisasinya masih jauh dari target, agar dapat diketahui penyebabnya dan dilakukan perbaikan. Penguatan koordinasi antar bidang dan percepatan proses pengadaan akan sangat membantu dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi pengelolaan anggaran dan pelaporan kinerja secara real-time akan meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas terhadap kendala di lapangan. Akhirnya, orientasi anggaran sebaiknya tidak hanya fokus pada serapan dana, tetapi juga pada pencapaian output dan dampak nyata bagi masyarakat, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan memberi nilai tambah yang terukur.

Dengan demikian, Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru dapat meningkatkan kinerjanya dan mencapai tujuan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surah At-Taubah/09:105

Adolph, R. (2018). *Kinerja Belanja Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung*. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jpan.v10i2.7630>

Afiah, N. ., Sri, M., & Adhi, A. (2020). *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua! Pada Entitas Akuntansi: Konsep dan Aplikasi* (Edisi Pert). KENCANA.

Afri Liyani, Y., Tiska Luthfita Desanti Putri Suharto, V., & Wira Bharata³, R. (2023). Analisis Varians Dan Pertumbuhan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Magelang Tahun 2018-2021. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v3i3.419>

Ani, S. W., Darwanto, D. H., Waluyati, L. R., & Mashyuri. (2023). Lowland Rice (*Oryza sativa* L.) Farming Performance in the Rice Production Center of Central Java Province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1275/1/012018>

Apriyanti, F. W., Tiara, S., & Dewi, R. sari. (2019). Analisis kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran pada badan pengelola keuangan dan aset kabupaten Serdang Bedagai. *Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian Masyarakat 2019*. <https://eprints.uty.ac.id/5213/>

Asoka, R. (2019). Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*. <https://doi.org/10.51877/jiar.v2i2.84>

Bakhtiar, Y. H., Faiz, K., & Fauzia, E. L. (2024). Konsep Pengukuran, Penilaian Dan Evaluasi. *Indonesian Jurnal of Nahdlatul Ulama*. <https://journal.isnujabar.or.id/index.php/ijnu/article/view/19>

Ceacilia, & Srimindari. (2004). Balanced Scorecard Sebagai Alternatif Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik. *Fakultas Ekonomi*.

Chaeroni, A. M., Masiva, B. R., Firdausiyah, Fi., & Sodiq, A. (2024). Pengukuran kinerja. *Sultra Journal Of Economic and Business*.

Cholik, A. A. (2016). Teori Efisiensi dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*. <https://doi.org/https://doi.org/10.21111/iej.v1i2.179>

Defitri, S. Y., Fetrisia, S., & Maison, W. (2021). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ekonomia. <https://doi.org/https://doi.org/10.54342/itbis-e.v1i1i.126>

G.Yulia Novita Sari, Satria Tri Nanda, Ika Berty, R. Z. (2022). Analisis value for money pada kinerja keuangan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Kompetif*. <https://doi.org/https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i1.839>

Gorahe, I. A. M., Masinambow, V., & Engka, D. (2018). Analisis Belanja Daerah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/5650/5182>

Harindra, I., & Sapari. (2019). Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Value For Money. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/477/449>

Hasanah, N., & Vidiyastutik, D. (2018). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Dalam Belanja Daerah Pemerintah Probolinggo. *Ecobuss*. <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ecobuss/article/view/338/345>

Hehanussa, S. jacomina. (2024). *Akuntansi Sektor Publik*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Husain, A. P. (2015). Analisis Varians Biaya Produksi Sebagai Alat Untuk Mengukur Tingkat Efisiensi Biaya Produksi Pada Ud. Berkas Anugrah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*.

Kainde, C. (2017). Analisis Varians dan Pertumbuhan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung. *Emba*.

Karinda, C. Y., Ilat, V., & Mawikere, L. (2018). Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Accountability*. <https://doi.org/10.32400/ja.3689.2.2.2013.73-84>

Kariyoto. (2018). IMPLEMENTASI VALUE FOR MONEY, INPUT OUTPUT OUTCOME DAN BEST VALUE SEBAGAI ALAT PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*. <https://doi.org/https://doi.org/10.32812/jibeka.v1i1.27>

Katit, F. X. ., & Pitanik, S. (2016). Analisis kinerja belanja pada pemerintah daerah Kabupaten Asmat Provinsi Papua. *Jurnal Emba*. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.4.3.2016.14291>

Kewas, L. F., Tawas, Y., & Sumual, F. M. (2024). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4727>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kinerja, A., Dalam, B., & Realisasi, L. (2023). *ANALISIS KINERJA BELANJA DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PADA KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2019-2021*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31959/jm.v12i2.1521>

Lembaran, T. (2023). *Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*.

Liando, G. Y., & Elim, I. (2016). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (Lra) Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.4.1.2016.12369>

Mahmudi. (2016a). *Akuntansi Sektor Publik* (Revisi). UII Press Yogyakarta.

Mahmudi. (2016b). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.

Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Edisi Terbaru*. ANDI OFFSET.

Megawati, D. L., Saifi, M., & Zahro, Z. A. (2016). Analisis Perhitungan Biaya Standar Sebagai Salah Satu Pendukung Efisiensi Biaya Produksi (Studi pada Koperasi Serba Usaha Brosem Batu Pada Tahun 2015). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*.

Muzaedah, S., Kamal, B., & Sulistyowati, D. (2019). *ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS 1B KABUPATEN TEGAL*.

Nevi Costari, & Putri Ariella Belinda. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan. *Jamanta : Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*. https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v1i1.421

Niansyah, F. I. W., & Biswan, A. T. (2018). Analisis Varians Anggaran Belanja untuk Pengukuran Kinerja (Studi Terapan pada KPP Badan dan Orang Asing). *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v3i4.79>

Paat, H. p, Nangoi, G. B., & Pusung, R. J. (2019). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v7i3.24044>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Palimbongan, R. R. I. (2019). Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v7i4.25444>
- Pangkey, I., & Pinatik, S. (2015). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Belanja. *Jurnal EMBA*. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.3.4.2015.10581>
- Pitaloka, D. L., Dimyati, D., & Purwanta, E. (2021). Peran Guru dalam Menanamkan Nilai Toleransi pada Anak Usia Dini di Indonesia. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.972>
- Pokhrel, S. (2024). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023 Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru*.
- Prasetyo, D. (2020). Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. *Juhanperak*.
- Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jimat.v11i1.24639>
- Rahmawati, W. R., & Heliana. (2022). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Bandung Conference Series: Accountancy*. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.625>
- Rasidi, R., & Sadmoko, R. (2019). Penerapan Konsep Balanced Scorecard Dalam Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v45i2.689>
- Ratnasari, W. (2019). *ANALISIS KINERJA BELANJA DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU*. <https://doi.org/https://doi.org/10.35914/jemma.v2i1.142>
- Riadi, M. (2020). Pengukuran Kinerja (Pengertian, Tujuan, Syarat, Indikator, Model dan Proses). *Kajian Pustaka*.
- Saputra, E., Latif, N., & Haryadi, R. M. (2020). Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Kalimantan Timur. *Ekonomia*.
<https://www.neliti.com/publications/393202/>

Saputri, S. H., & Kurnia. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.

Sholikhah, A. L., & Priyono, N. (2022). Analisis Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi*.
<https://doi.org/10.28932/jam.v14i1.4309>

Silitonga, P. V. (2022). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Prima*. <https://doi.org/10.34012/jebim.v4i1.2648>

Suaedi, F. (2019). *Dinamika Manajemen Strategis Sektor Publik di Era Perubahan*. Airlangga University Press.

Suhaedi, W. (2019). Analisis Belanja Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*.
<https://doi.org/10.29303/aksioma.v18i2.82>

Supriyanto, B. E. (2024). *Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas beban APBN*. Djpb.Kemenkeu.Go.Id.
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/artikel/3690-pengukuran-dan-evaluasi-kinerja-anggaran-atas-beban-apbn.html>

Susanti, A., Riadi, S., & Sari, D. (2022). Analisis Rasio Kesenjangan Belanja Pada Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. *Jurnal Ilmu Manajemen Saburai (JIMS)*.
<https://doi.org/10.24967/jmb.v8i1.1600>

Syafrizal, R. (2019). Analisis Kinerja Islamic Human Resources Berdasarkan Metode Masalah Scorecard (Studi Kasus Pada Pt. Inalum). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.30829/ajei.v4i2.5554>

Tempo.co. (2025). *Prabowo Targetkan Efisiensi Anggaran di Tahun 2025, Ekonom: Arah Pembangunan Sesuai Prioritas Nasional*. Tempo.Co.
<https://www.tempo.co/ekonomi/prabowo-targetkan-efisiensi-anggaran-di-tahun-2025-ekonom-arah-pembangunan-sesuai-prioritas-nasional-1203381>

Uno, H. ., & Nina, L. (2022). *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. PT. Bumi Aksara.

Waryanto, P. (2017). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*. <https://doi.org/10.33105/itrev.v2i1.13>

Yadiati, W. (2015). *Teori Akuntansi: Suatu pengantar*. Prenada media group.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zamzami, F. (2025). *Efisiensi Anggaran dan Produktivitas Nasional, Navigasi Kebijakan di Tengah Tantangan*. Republika.Co.Id.
<https://analisis.republika.co.id/berita/srwxja393/efisiensi-anggaran-dan-produktivitas-nasional-navigasi-kebijakan-di-tengah-tantangan>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Dokumentasi bersama Ibu Endang Yuliana dan Bapak Sader saat akan melakukan pengolahan data di Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru.



BIOGRAFI PENULIS



Penulis Bernama Diva Nadaa Hafiza, lahir di Pekanbaru, 19 Maret 2004. Ayahanda Bernama Surya Mahdi dan Ibunda bernama Dian Anggraini. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Jenjang Pendidikan dimulai dari SD ANNUR Pekanbaru dari tahun 2010-2016. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMPN 5 Pekanbaru dari tahun 2016-2019. Kemudian melanjutkan Pendidikan di MAN 2 Pekanbaru dari tahun 2019-2022.

Kemudian pada tahun 2022 penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial dengan Program Studi D-III Akuntansi.

Berkat Rahmat Allah SWT, pada tanggal 27 Mei 2025, penulis melaksanakan ujian Tugas Akhir yang berjudul **“Pengukuran Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru”** dan dinyatakan lulus dengan IPK 3.37 dengan gelar Ahli Madya Akuntansi (A.Md.Ak).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.